

Transformasi Sosial Melalui Gereja : Menerapkan Prinsip-Prinsip Manifesto Politik Yesus dalam Menyikapi Ketidakadilan Sosial

Yuni Rolina Berutu *

STT Abdi Sabda Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: yuniberutu234@gmail.com *

Abstract, *This research explores the role of the church as an agent of social change by applying the principles contained in Jesus' political manifesto. In the context of increasing social injustice, the church is expected not only to function as a place of worship, but also as an entity that is active in empowering society. Through a theological and praxis approach, this study analyses how the teachings of Jesus can be implemented in concrete actions to address issues of injustice, such as poverty, discrimination and inequality. Using a qualitative method, this research collected data through interviews and case studies in various church communities that have successfully carried out social transformation. The results show that the application of these principles not only improves the quality of life of congregation members, but also strengthens solidarity and social care in the community. The findings are expected to provide new insights for churches in formulating more effective and relevant ministry strategies to address social challenges in the modern era.*

Keywords: *Social transformation, church, Jesus' political manifesto, social injustice.*

Abstrak, Penelitian ini mengeksplorasi peran gereja sebagai agen perubahan sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam manifesto politik Yesus. Dalam konteks ketidakadilan sosial yang semakin meningkat, gereja diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai entitas yang aktif dalam memberdayakan masyarakat. Melalui pendekatan teologis dan praksis, penelitian ini menganalisis bagaimana ajaran Yesus dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata untuk mengatasi isu-isu ketidakadilan, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kasus di berbagai komunitas gereja yang telah berhasil melakukan transformasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anggota jemaat, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi gereja dalam merumuskan strategi pelayanan yang lebih efektif dan relevan untuk menjawab tantangan sosial di era modern.

Kata kunci: Transformasi sosial, gereja, manifesto politik Yesus, ketidakadilan sosial.

1. PENDAHULUAN

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, gereja memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang dapat mendorong transformasi sosial melalui penerapan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Manifesto politik Yesus, yang menekankan keadilan, kasih, dan kepedulian terhadap sesama, menjadi landasan penting bagi gereja untuk merespons berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, gereja dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Ketidakadilan sosial sering kali muncul dalam berbagai bentuk, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, gereja tidak hanya dipanggil untuk

memberikan bantuan material, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif di antara anggotanya mengenai pentingnya keadilan sosial. Melalui pelayanan diakonia dan program-program pemberdayaan masyarakat, gereja dapat menjadi wadah bagi anggotanya untuk terlibat aktif dalam upaya mengatasi ketidakadilan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana gereja dapat menerapkan prinsip-prinsip manifesto politik Yesus dalam praktik nyata untuk menyikapi ketidakadilan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh gereja-gereja dalam konteks lokal dan global. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran gereja dalam transformasi sosial, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi gereja untuk meningkatkan efektivitas pelayanannya. Melalui pendahuluan ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya peran gereja dalam menyikapi ketidakadilan sosial serta bagaimana prinsip-prinsip ajaran Yesus dapat diintegrasikan ke dalam tindakan nyata yang membawa perubahan positif bagi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami peran gereja dalam transformasi sosial melalui penerapan prinsip-prinsip manifesto politik Yesus. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran gereja dalam transformasi sosial serta kontribusi nyata dari penerapan prinsip-prinsip manifesto politik Yesus dalam menyikapi ketidakadilan sosial di masyarakat.

Pembahasan

Teologi Pembebasan Sebagai Konsep Jalan Politik Yesus

Teologi Pembebasan adalah sebuah konsep teologi yang menekankan pada tindakan nyata untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Dalam konsep ini, Yesus yang datang ke dunia dianggap sebagai pembawa kasih dan keadilan bagi umat manusia. Solidaritas sosial dipandang sebagai manifestasi dari kehadiran Kristus. Manifesto politik Yesus terjadi sejak Ia mulai mengabarkan Injil keselamatan bagi semua orang, dimulai dari kritik terhadap otoritas politik penguasa, Yesus sering mengkritik dan menentang otoritas politik pada masa pelayanan-Nya, baik itu penguasa Romawi maupun pemimpin agama Yahudi yang dianggap korup, menindas, dan mengabaikan rakyat miskin. Ia menentang hirarki kekuasaan yang ada dengan membangun komunitas pengikut baru. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Gustavo Gutierrez yang menentang semua bentuk penindasan yang terjadi.

Sebagai seorang teolog Gutierrez melihat kehidupan kaum termarginalkan, miskin, tertindas sebagai urgensi atau isu krusial dari sebuah teologi. “Teologi pembebasan dimuali sebagai refleksi iman dalam tindakan bersama atas orang miskin dan yang terpinggirkan, dan telah berkembang ke ranah praksis, refleksi teologis, dan hermeneutika pascakolonial”.

Visi kerajaan Allah sebagai tatanan alternatif sebagai konsep utama yang disampaikan Yesus adalah “Kerajaan Allah”, yang bisa ditafsirkan sebagai visi masyarakat ideal dan adil, damai, dan bebas dari penindasan. Ini merupakan konsep tatanan sosial-politik alternatif yang digunakan oleh Yesus untuk menentang dunia pada saat itu. Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Gutierrez bahwa konsep teologi dalam hal ini kerajaan Allah seharusnya adalah *the second act* yang mengikuti praksis yang adalah *the first act*. Yang dimaksud dengan praksis adalah kontemplasi (doa) dan aksi (komitmen). Inilah yang mencirikan Teologi Pembebasan, bahwa praksis selalu mendahului refleksi. Teologi pembebasan pada umumnya memfokuskan praksis pembebasan bagi kaum termarginalkan, yang miskin, tertindas dan teraniaya, dengan tidak semata-mata menyuarakan keprihatinan dan kepedulian dari belakang meja belajar, tetapi turut menceburkan diri dalam kehidupan rakyat dan bersama-sama mengupayakan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan mereka. Konsep kerajaan Allah menjadi konsep refleksi teologis dan konsep praksis dalam melawan penindasan dan ketidakadilan terhadap beberapa masalah yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Ketidaksetaraan Gender, Antroposentris terhadap alam, kemiskinan, peperakan adalah sebuah hal-hal yang harus di teropong dan dikaji menggunakan konsep politik Yesus yang menyuarakan Kehadiran Kerajaan Allah sebagai Teologi Pembebasan.

Tindakan Politik Gutierrez menekankan sifat politik dari pelayanan Kristus. Kristus tidak tergabung dalam gerakan orang Zelot Yahudi, namun Ia terus menerus melawan pihak penguasa dan struktur-struktur kekuasaan politik pada zaman-Nya, dimana Ia disalibkan juga oleh penguasa politik-politik tersebut. Kristus menyerang akar ketidakadilan sosial, yang berarti bahwa Ia mengaitkan pembebasan masa kini dengan sejarah keselamatan yang bersifat revolusioner, kekal dan universal. Perkara-perkara politik tercakup di dalam kekekalan dan karya Kristus bersifat politik justru karena menyelamatkan manusia. Meneladani sifat pelayanan Yesus diatas, adalah tidak mungkin bagi gereja untuk hidup di dalam Injil jikalau terpisah dari keterlibatan politik, karena pesan injil itu sendiri mempunyai dimensi politik yang tidak dapat dihindarkan. Lebih jauh situasi ketidakadilan yang membuat berjuta-juta orang Amerika Latin menderita, menuntut orang-orang Kristen untuk mewujudkan pembebasan dalam semua bentuknya.

Dalam karya klasiknya, *A Theology of Liberation*, Gustavo Gutierrez menekankan bahwa program politis yang terkait dengan gerakan pembebasan harus berpusat pada spiritualitas pembebasan. Gutierrez tentunya sadar akan bahaya-bahaya mengabsolutkan usaha-usaha politis yang menjadi favorit kita, yang karenanya menjadi sangat selektif dalam menemukan tema-tema Kristen yang berguna untuk menyebarkan tujuan-tujuan yang sudah kita sendiri tentukan. Untuk mengatasi kecenderungan sedemikian, Gutierrez berpendapat bahwa hidup kekristenan harus dipenuhi dengan sebuah pemahaman yang hidup tentang *tahu berterima kasih* (gratuitousness). Persekutuan dengan Tuhan dengan semua (umat manusia) lebih dari segalanya adalah sebuah pemberian. Partisipasi kita dalam ibadah, dia katakan adalah sebuah kegiatan waktu luang, sebuah waktu yang terbuang, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan berada di luar kategori yang berguna dan tidak berguna. Dalam persekutuan ibadah kita dengan Allah, Gutierrez mengatakan pada kita, kita melihat kedepan ke sebuah masa depan indah saat kita mendengar, dia katakan sebagai undangan untuk berpartisipasi dalam sukacita eskatologis.

Kasih dan Keadilan Sebagai Konsep Politik Yesus

Yesus adalah figur yang menjalankan misi yang diberikan oleh Allah di dunia. Selama hidup dan pelayanannya, Yesus tidak hanya memberi makan kepada yang lapar, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, tetapi juga membela yang lemah dan tak berdaya. Selain memberitakan pengampunan dari Allah, Yesus juga memberdayakan yang lemah. Sebagai contoh, dalam Lukas 5:17-26, Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, sehingga memungkinkannya untuk berjalan dan menjadi mandiri. Pelayanan yang dijalankan haruslah sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus. Noordegraaf mengungkapkan bahwa orang yang benar-benar mengikuti teladan Yesus dan percaya kepada-Nya pasti akan hidup dan bertindak secara pelayanan yang membantu, sebagaimana yang Dia tunjukkan.

Yesus memberikan contoh kepada murid-murid-Nya untuk memperhatikan orang miskin, yang juga diungkapkan dalam Lukas 4:18-19. Di sana, Dia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada yang tertawan, memberikan penglihatan kepada yang buta, membebaskan yang tertindas, serta memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Dengan jelas, Yesus terlibat dalam pelayanan kepada yang menderita, terhina, dan tersisih. Pelayanan kepada orang-orang yang menderita, terhina, dan tersisih dipandang sebagai pelayanan kepada Yesus karena Dia mengidentifikasi dirinya dengan mereka (Matius 25:35-46). Seperti Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang terpinggirkan, melayani mereka juga dianggap sebagai melayani Yesus.

Dalam Matius 22:34-40 disebutkan bahwa kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah harus dinyatakan melalui kasih kepada sesama, yang diwujudkan dalam perbuatan nyata dan bukan hanya dengan kata-kata belaka. Berbuat baik dan memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan dianggap sebagai korban yang diterima oleh Allah (Ibrani 13:16). Memberikan dan berbagi merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dipatuhi (1 Timotius 6:18). Jelas bahwa sebagai umat Allah, kita memiliki kewajiban untuk memberi dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Memberi dan berbagi adalah cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas berkat-Nya. Memberi dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan tidak akan membuat kita kekurangan, seperti yang dicontohkan dalam 1 Raja-raja 17:12-16, di mana seorang janda di Sarfat tidak kekurangan ketika dia memberikan roti terakhirnya kepada nabi Elia. Sebagaimana Allah memperhatikan mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan, demikian juga umat Tuhan harus memiliki kepedulian untuk memberi dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan.

Asas keadilan sosial adalah sebuah perhatian terhadap nasib anggota masyarakat yang terbelakang. Keadilan sosial memiliki tiga prinsip yang harus menjadi perhatian publik yakni keadilan atas hak, keadilan atas dasar jasa dan keadilan atas dasar kebutuhan. Ketiga prinsip itulah yang menjadi peran politik Yesus masa pemerintahan di Romawi, sehingga Ia menentang penindasan yang terjadi pada masa itu. Prinsip keadilan pada saat ini sudah mulai tidak menjadi bahan kontemplasi lagi bagi orang-orang banyak khususnya gereja. Banyak orang menganggap ketidakadilan adalah hal lumrah yang tidak perlu diprotes secara mendalam.

Keadilan harus mencerminkan visi dan misi nasional dan keagamaan. Agama-agama berupaya untuk mencapai keadilan dalam cahaya ilahi, sementara negara berusaha mewujudkan keadilan melalui proses politik. Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem pengelolaan kekuasaan, sehingga politik yang dijalankan harus bersifat demokratis. Ini berarti bahwa pengelolaan kekuasaan harus didasarkan pada keadilan sosial, di mana rakyat menjadi subjek utama dalam mengatur sumber daya alam, hubungan antarwarga atau kelompok yang beragam, dan penerapan hukum. Gereja, khususnya di Indonesia, mendukung politik yang demokratis sesuai dengan prinsip Pancasila. Dengan demikian, teologi politik gereja untuk keadilan sosial, dalam menghadapi politik praksis yang muncul pasca Orde Baru, didasarkan pada visi Injil tentang *shalom* dan ideal Indonesia merdeka.

PGI menyebut ikatan dan posisi teologis dan politis ini sebagai pandangan nasionalis yang oikumenis, dengan tujuan utama untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam dokumen yang disebut sebagai Pokok-Pokok Tugas Panggilan

Bersama (PTPB), PGI menetapkan dasar teologis dan misiologis bagi gereja-gereja Kristen Protestan di Indonesia sebagai berikut:

1. Gereja hadir karena panggilan dan utusan dari Allah, dimaksudkan untuk menjadi berkat bagi semua bangsa (lihat Kejadian 12:1-3).
2. Sebagai kelanjutan dari misi Kristus, gereja dipanggil dan diutus oleh Yesus Kristus sendiri untuk menyebarkan Injil dan diberi kuasa untuk mengusir setan, tanpa memandang latar belakang mereka (lihat Markus 3:13-19).
3. Gereja memiliki panggilan untuk menghasilkan hasil yang baik, sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus (lihat Matius 7:15-23).
4. Kesatuan gereja juga memiliki tujuan misi untuk membawa dunia kepada iman (lihat Yohanes 17:21).

Kehadiran dan peran gereja diartikan sebagai tanggung jawab politik dalam konteks kehidupan berbangsa. Gereja hadir bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi dalam rangka panggilan dan utusan untuk menjadi berkat bagi semua. Oleh karena itu, gereja memiliki tanggung jawab politik yang dipandang sebagai praktik teologis yang relevan bagi semua orang. Di Indonesia, ini mencakup semua warga negara yang memiliki identitas agama dan etnis mereka masing-masing.

Peranan Gereja dalam Melawan Ketidakadilan

Gereja solider kepada korban ketidakadilan, Gereja menghadapi realitas konkret berupa ketidakadilan, yang selalu mengakibatkan penderitaan bagi korban maupun pelakunya, dalam segala bentuknya. Tindakan ketidakadilan ini pada dasarnya merendahkan martabat individu. Realitas ini merupakan tantangan berat bagi Gereja dalam memperlihatkan dan mewujudkan kehendak Allah, yang menginginkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, adalah jelas bagi Gereja untuk memilih untuk mempromosikan perdamaian, memulihkan kehidupan, dan menghormati martabat manusia sesuai dengan kehendak Allah. Melindungi dan memperjuangkan kehidupan serta martabat manusia merupakan tindakan yang proaktif dalam menentang dan melawan ketidakadilan. Gereja diharapkan berupaya mengubah situasi ketidakadilan menjadi lingkungan yang mendukung dan memuliakan manusia, sehingga perdamaian dapat terwujud dan kehidupan manusia dapat berkembang dengan lebih baik.

Dalam konteks yang sangat menekan kehidupan manusia ini, perjuangan untuk membela kehidupan manusia merupakan wujud dari kehendak Allah. Fokus utama dari perjuangan ini adalah mengembalikan martabat manusia dan menciptakan kehidupan yang damai bagi semua orang. Oleh karena itu, dalam perjuangan ini, penting untuk mempertimbangkan martabat manusia, termasuk martabat para pelaku ketidakadilan. Hal ini

didorong oleh kepedulian terhadap martabat manusia yang terabaikan dan kesadaran akan kasih dan penghargaan Allah terhadap manusia. Karena pentingnya martabat manusia, upaya melawan ketidakadilan tidak boleh mengarah pada upaya untuk menghancurkan pelaku ketidakadilan. Tindakan semacam itu hanya akan memperburuk kondisi martabat mereka yang sudah terkikis. Gereja tidak dapat meningkatkan martabat manusia yang menjadi korban ketidakadilan dengan cara merendahkan martabat para pelaku. Merendahkan martabat mereka akan berdampak pada merendahkan martabat manusia secara keseluruhan. Tindakan semacam itu tidak akan berbeda dengan balas dendam, yang pada akhirnya akan menempatkan mereka dan Gereja pada posisi yang sama sebagai pelaku ketidakadilan. Hal ini akan berkontribusi pada perputaran yang tak berujung dari ketidakadilan.

Cinta kasih Allah yang diteruskan oleh Gereja untuk disalurkan kepada manusia pada gilirannya menginspirasi terbentuknya solidaritas. Cinta Ilahi, yang menjadi inti kehidupan gereja, mendorong gereja untuk memiliki sikap solidaritas yang sejati dengan setiap orang yang menderita. Kasih kepada para korban bukanlah sekadar kasih afektif yang hanya berdiam dalam perasaan. Cinta kasih tersebut juga harus memiliki dimensi efektif, yaitu diwujudkan dalam tindakan nyata dan usaha demi kebaikan yang dicintai. Oleh karena itu, solidaritas kepada sesama manusia bukanlah semata-mata sebuah perasaan, melainkan sebuah tindakan aktif yang berakar pada cinta. Solidaritas yang berbasis pada cinta ini mendorong individu untuk berupaya aktif menciptakan kebaikan bagi mereka yang dicintai dan disolidaritas. Adanya rasa empati dan partisipasi dalam penderitaan bersama korban memberikan mereka harapan dan semangat untuk ikut serta dalam upaya memperbaiki kondisi kehidupan. Solidaritas semacam ini harus mendorong gereja untuk bersama-sama berjuang demi perubahan yang lebih manusiawi bersama mereka yang menjadi fokus solidaritasnya.

Contoh nyata solidaritas yang aktif ini dapat dilihat dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri. Yesus aktif berusaha untuk mengubah situasi agar orang-orang yang terpinggirkan dapat mendapatkan kembali martabat mereka. Dia berani menantang pandangan umum yang menindas manusia, seperti pandangan tentang balas dendam yang terlihat sebagai keadilan (lihat Matius 5:38-42). Dia dengan tegas mengkritik para pelaku ketidakadilan (lihat Matius 23:1-36) dan tidak ragu-ragu untuk menentang hukum yang tidak adil, seperti hukum yang mengizinkan melempari perempuan yang dituduh berzinah dengan batu (lihat Yohanes 8:1-11). Upaya Yesus untuk memperbaiki situasi ini termasuk memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan ketidakadilan dan mengajak mereka untuk bertobat, seperti yang dialami Zakheus. Zakheus bertobat karena merasakan kasih dan pengampunan yang datang dari Yesus (lihat Lukas 19:2-10).

Solidaritas, pada satu sisi, mencerminkan keinginan untuk terlebih dahulu berpihak pada para korban. Di sisi lain, solidaritas juga berarti bersama-sama dengan para korban untuk menciptakan perubahan menuju situasi yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran gereja dalam masyarakat. Bagaimana gereja memposisikan dirinya dalam kehidupan sosial? Bagaimana gereja mengimplementasikan solidaritasnya terhadap para korban ketidakadilan? *Gereja merangkul pelaku ketidakadilan*, Dalam situasi ketidakadilan, seringkali kita menganggap bahwa hanya korban yang mengalami penurunan moral. Namun, sebenarnya para pelaku ketidakadilan juga mengalami penderitaan yang sama, karena tindakan ketidakadilan mereka tidak mencerminkan kedalaman martabat kemanusiaan mereka. Para pelaku ketidakadilan juga memiliki sisi kemanusiaan yang sama dengan para korban. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan martabat manusia juga harus diperuntukkan bagi mereka. Solidaritas dan kasih haruslah melibatkan dan memperhatikan para pelaku. Meskipun mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, kehidupan mereka juga terancam dan perlu dilindungi. Gereja harus berperan dalam merangkul para pelaku ketidakadilan untuk membantu mereka kembali menjalani kehidupan yang bermartabat.

Gereja diminta untuk mematuhi ajaran Yesus yang menyuruh, "Aku katakan kepadamu: kasihilah musuhmu dan doakanlah bagi mereka yang menyakiti kamu. Dengan melakukan itu, kamu akan menjadi anak-anak Bapamu di surga" (Matius 5:44-45). Gereja hanya mampu memeluk para pelaku jika bergantung pada kekuatan cinta kasih. Cinta kasih adalah niat baik yang bersedia memahami, menciptakan solusi, dan memiliki sifat penebusan terhadap semua orang. Gereja menawarkan cinta kasih yang berwujud pengampunan kepada mereka yang melakukan tindakan ketidakadilan ini. Dengan demikian, Gereja sebenarnya membawa kehadiran Allah kepada mereka, Allah yang mencari dan mengampuni orang berdosa tanpa memperhitungkan dosa mereka.

Memulihkan martabat manusia akibat ketidakadilan, Gereja berada di tengah-tengah masyarakat manusia dan merasa terikat dengan nasib mereka. Gereja ingin menunjukkan solidaritas dan kasihnya dengan memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan kembali dan memperkuat persaudaraan di antara semua manusia. Solidaritas dan kasih yang ditekankan oleh Gereja ini khususnya ditujukan kepada individu-individu yang miskin, lemah, dan menderita. Biasanya disebut *preferential option for the poor*. Sikap ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, di mana beberapa orang menganggap bahwa dengan sikap ini, Gereja hanya memihak kepada orang-orang miskin dan menderita. Namun, pemahaman semacam itu keliru. Intinya sangat sederhana. Sama seperti orang tua yang tidak bisa dianggap tidak adil jika lebih memperhatikan anak yang lemah dibandingkan dengan anak yang kuat,

demikian juga dengan Gereja. Pemahaman ini didasarkan pada ajaran Yesus sendiri: “Orang yang sehat tidak memerlukan dokter” (Matius 9:12; Markus 2:17). Kasih Gereja kepada umat manusia ditunjukkan melalui pengabdian dan pelayanan kepada mereka yang miskin dan menderita.

Dalam konteks ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, Gereja dipanggil untuk bertindak. Gereja harus menunjukkan solidaritasnya dengan orang-orang yang miskin dan menderita yang terkena dampak ketidakadilan, sebagaimana Kristus selalu mendukung mereka. Ini adalah tanggung jawab yang berat bagi Gereja dunia jika ingin benar-benar menjadi wakil Allah di tengah-tengah realitas bangsa ini. Berikut adalah beberapa saran yang bisa dilakukan oleh Gereja untuk merespons ketidakadilan di Indonesia dan Dunia :

Gereja Membuka Diri Terhadap Kritik Moral Baru

Bagaimana seharusnya Gereja bersikap dan berdiri teguh di tengah situasi yang penuh ketidakadilan? Dalam menghadapi kondisi semacam itu, apakah Gereja Indonesia dan Dunia sudah cukup memberikan nasihat-nasihat moral, seperti pentingnya memberi pengampunan kepada para pelaku ketidakadilan, mendorong rekonsiliasi dalam masyarakat, dan menegakkan keadilan melalui pemberitaan-pemberitaan atau himbauan? Menurut Gustavo Gutierrez, jika Gereja ingin sungguh-sungguh terlibat dalam upaya membebaskan kaum tertindas, maka tidak cukup lagi bagi Gereja hanya memberikan nasihat-nasihat moral. Gereja harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor politik. Dengan demikian, tidaklah masuk akal bagi Gereja untuk tetap diam dan bersikap netral di tengah situasi yang penuh ketidakadilan. Dengan memilih untuk tetap netral dan diam, Gereja secara sadar atau tidak sadar telah menjadi pelindung status quo. Akibatnya, jika Gereja hanya diam, maka tidak akan ada perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan begitu, status quo akan terus dipertahankan.

Gereja Indonesia seringkali terjebak dalam pandangan bahwa Gereja seharusnya menjadi kekuatan moral, sementara gerakan-gerakan masyarakat, termasuk umat Kristen, diizinkan untuk berperan sebagai kekuatan politik. Namun, masalahnya adalah bahwa tanpa terlibat dalam gerakan kemasyarakatan, "kekuatan moral" Gereja mudah terperangkap dalam pandangan moralis. Gereja harus menyadari bahwa perubahan terhadap pelaku ketidakadilan hanya akan terjadi jika ditekan melalui mobilisasi rakyat. Selama ini, Gereja telah membatasi dirinya hanya pada kritik terhadap kondisi ketidakadilan di masyarakat oleh rezim yang berkuasa, tanpa mengajukan pertanyaan tentang legitimasi rezim tersebut. Masalah pendekatan Gereja Indonesia terletak di sini. Selama kepemimpinan Gereja membatasi diri hanya pada pemberian nasihat moral melalui khotbah atau himbauan, maka rezim represif tidak akan

merasa terancam. Namun, jika gerakan moral digabungkan dengan gerakan politik, seperti advokasi, maka rezim akan segera bereaksi.

Gereja Indonesia perlu menyadari bahwa selama ini pandangan moralis yang diusung oleh Gereja tidak pernah mengancam rezim yang represif. Gerakan moral yang dilakukan oleh Gereja justru disukai oleh aparat negara yang represif dan sesuai dengan harapan mereka terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Sebagai kekuatan moral yang terkesan netral, Gereja justru semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, sebelum Gereja dapat menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah ketidakadilan di negara ini, kita perlu menghilangkan "mitos" bahwa Gereja adalah kekuatan moral. Perubahan terhadap budaya ketidakadilan tidak akan terjadi melalui ceramah moralis, tetapi melalui perjuangan pembebasan oleh para korban. Apabila Gereja ingin berperan sebagai agen perubahan dan ikut serta dalam menyelesaikan masalah ketidakadilan saat ini, ia harus mengambil langkah sebagai gerakan keagamaan yang memiliki kepedulian, terlibat secara sosial, dan menyatu dengan masyarakat miskin dan para korban ketidakadilan. Langkah yang diambil oleh Gereja adalah mendukung sepenuhnya mereka yang menjadi korban ketidakadilan, yang merupakan perubahan drastis terhadap peran dan sikap Gereja di masa lalu. Gereja yang sebelumnya dekat dengan para pemimpin sekarang harus bersedia untuk berpindah ke sisi yang tertindas dan menderita akibat ketidakadilan. Karena sikap ini, Gereja harus siap menghadapi risiko konfrontasi dengan para pemimpin, donor, dan risiko kehilangan keistimewaan. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil oleh Gereja. Gereja berperan sebagai penengah dari ketidakadilan yang diciptakan oleh pemimpin politik atau bahkan gereja merubah posisi kedudukannya sebagai alat untuk melawan ketidakadilan tersebut. Gereja tidak hanya sebagai pembawa berita kenabian melainkan juga sebagai pelaksana suara kenabian tersebut untuk melawan penindasan dan ketidakadilan.

Gereja Hadir Sebagai Saksi Belas Kasih Allah

Dalam konteks ketidakadilan, Gereja diminta untuk menunjukkan kesaksian kasih, baik melalui kata maupun tindakan, baik secara individu maupun bersama-sama. Kesaksian kasih Gereja pertama-tama harus terlihat di dalam komunitas gereja itu sendiri. Jika kehidupan anggotanya masih dipenuhi dengan konflik, dendam, ketidakmauan untuk mengampuni, perpecahan, dan keinginan untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok, maka Gereja tidak akan mampu memberikan kesaksian kepada masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, jika kehidupan dalam komunitas gereja dipenuhi dengan kasih, kesiapan untuk memaafkan, dan keadilan, maka Gereja sudah memberikan kesaksian hidup kepada masyarakat. Kesaksian kasih Gereja juga harus diekspresikan melalui aktivitas yang dilakukan di luar. Gereja dianggap sebagai manifestasi kehadiran Allah di dunia, suatu tanda dan sarana untuk bersatu dengan

Allah dan seluruh umat manusia. Pendekatan eklesiologi seperti ini menempatkan Gereja bukan sebagai kelompok eksklusif yang menerima berkat keselamatan, tetapi sebagai komunitas yang memiliki misi misioner. Gereja, yang berfungsi sebagai tanda dan alat itu, harus aktif di tengah-tengah dunia dan berjuang untuk menciptakan persatuan umat manusia. Oleh karena itu, peran Gereja bukanlah untuk mendominasi dunia sebagai sebuah kelompok elit, tetapi untuk menjadi bagian dari dunia sebagai hamba yang berkomitmen untuk kesatuan dan keutuhan dunia. Kesaksian hidup Gereja tidak bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota, melainkan untuk menampilkan Gereja yang terlibat secara nyata dalam realitas sosial dan yang setia dalam membawa kasih, perdamaian, dan persatuan di antara umat manusia.

Gereja Indonesia dan Dunia perlu melakukan pertobatan karena selama ini cenderung memiliki pandangan bahwa dirinya adalah yang benar, sementara menganggap kelompok lain yang bersalah. Sikap seperti ini membuat Gereja sulit untuk melakukan introspeksi, memberikan pengampunan, dan memperbaiki hubungan dengan kelompok yang dianggap bersalah. Gereja juga perlu melakukan pertobatan karena cenderung mengadopsi pendekatan yang bersifat elit. Pendekatan ini terlihat dari keberadaan Gereja dalam masyarakat melalui bangunan-bangunan mewah dan fokusnya pada kaum elit, seperti gereja yang megah, sekolah Kristen elit, dan rumah sakit yang mahal. Pendekatan ini menjauhkan Gereja dari mayoritas rakyat, terutama mereka yang mengalami ketidakadilan. Gereja menjadi asing dan tidak akrab dengan mereka, dan sebaliknya, mereka juga menjadi orang asing bagi Gereja. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin Gereja dapat menyampaikan pesan pengampunan dan menjadi saksi kasih Allah? Oleh karena itu, Gereja perlu bertobat, mengubah pendekatan elit tersebut, dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih inklusif. Sebagaimana kita tahu bahwa pendekatan inklusif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau karakteristik mendapatkan akses keadilan dan setara. Hanya melalui pendekatan ini, Gereja dapat menjadi lebih dekat dan akrab dengan rakyat yang tertindas, menjadi solidaritas dengan mereka, dan memberikan kesaksian akan kasih Allah. Pertemuan antara Gereja dan penderitaan serta ketidakpuasan rakyat yang menjadi korban ketidakadilan merupakan kesempatan bagi Gereja untuk mengembalikan martabat mereka. Gereja juga dipanggil untuk melakukan pelayanan. Fondasi pelayanan Gereja ini harus dipahami dalam kerangka pelayanan Kristus. Kehendak Kristus untuk melayani daripada menerima pelayanan harus menjadi prinsip dasar Gereja dalam menjalankan misi Kristus. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam dan dalam situasi di mana banyak orang menderita karena ketidakadilan, Gereja harus menunjukkan sikap penghargaan terhadap

individu-individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dan harus siap untuk bertemu dan melayani siapapun tanpa melakukan diskriminasi.

Kontribusi Pemikiran Gunche Lugo Dalam Keterlibatan Gereja Dalam Mengatasi Ketidakadilan Sosial

Realitas ketidakadilan yang menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, khususnya mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan, keadilan gender dan eksploitasi alam masih tetap ada di negara ini hingga saat ini. Dalam konteks seperti ini, Gereja seharusnya menyadari panggilannya. Gereja dipanggil untuk memperdalam keyakinan dan memahami kasih Allah dengan menerapkan prinsip manifesto politik Yesus, sehingga mampu menjadi agen keadilan dan cinta dalam masyarakat. Gereja melanggar esensi dan misinya jika membiarkan ketidakadilan terus berlangsung tanpa keterlibatan dan upaya aktif untuk menghadapinya.

Yesus adalah figur yang menjalankan misi yang diberikan oleh Allah di dunia. Selama hidup dan pelayanannya, Yesus tidak hanya memberi makan kepada yang lapar, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, tetapi juga membela yang lemah dan tak berdaya. Selain memberitakan pengampunan dari Allah, Yesus juga memberdayakan yang lemah. Yesus terlibat dalam pelayanan kepada yang menderita, terhina, dan tersisih. Pelayanan kepada orang-orang yang menderita, terhina, dan tersisih dipandang sebagai pelayanan kepada Yesus karena Dia mengidentifikasi dirinya dengan mereka (Matius 25:35-46). Seperti Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang terpinggirkan, melayani mereka juga dianggap sebagai melayani Yesus. Demikian hendaknya gereja juga meneladani figur kepelayanan Yesus dengan penuh tanggung jawab sebagai wadah menyampaikan *Shalom* Allah.

Kontribusi Pemikiran Gunche Lugo Terhadap Ketidakadilan di Indonesia

Gunche Lugo memiliki perspektif atau pendekatan khas dalam mengaitkan ajaran Yesus dengan politik, khususnya dalam konteks ketidakadilan di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hal ini bisa dirumuskan secara politis dan kontekstual:

1. Penekanan pada Keadilan Sosial dan Ekonomi

Lugo bisa menyoroti bagaimana ajaran Yesus mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi, yang relevan dengan konteks Indonesia di mana ketimpangan ekonomi dan sosial masih tinggi. Dalam manifesto politiknya, ini mungkin dirumuskan sebagai dorongan untuk kebijakan redistributif yang lebih adil, seperti pemberian hak-hak masyarakat seperti yang tertuang didalam undang-undang dasar serta perwujudan dari kesejahteraan sosial.

2. Kritik terhadap Struktur Kekuasaan yang Menindas

Lugo mungkin mengambil sikap tegas terhadap struktur kekuasaan yang menindas dan korup, mencerminkan ajaran Yesus yang sering mengkritik penguasa yang tidak adil. Ini bisa dirumuskan dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi publik

3. Inklusivitas dalam Kebijakan Publik

Pendekatan Lugo mungkin menekankan inklusivitas, sesuai dengan ajaran Yesus yang mencakup semua orang tanpa memandang latar belakang. Hal yang sangat disoroti dalam hal ini adalah hak-hak minoritas dan keadilan gender. Aksesibilitas untuk Semua: Meningkatkan aksesibilitas dalam layanan publik, pendidikan, dan infrastruktur untuk semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

4. Membangun Perdamaian dan Rekonsiliasi

Lugo mungkin menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi, sesuai dengan ajaran Yesus tentang pengampunan dan perdamaian. Ini bisa diwujudkan dalam konteks politik Indonesia sebagai, dialog umat beragama dan program rekonsiliasi terhadap ketimpangan terhadap kaum marginal.

5. Pendekatan Kontekstual terhadap Ketidakadilan

Ketidakadilan di Indonesia bisa mencakup berbagai isu, termasuk ketimpangan ekonomi, diskriminasi rasial dan agama, serta korupsi sistemik. Lugo mungkin mengadaptasi ajaran Yesus untuk merespons isu-isu ini secara kontekstual, misalnya, Keadilan Lingkungan, Keadilan Ekonomi, keadilan terhadap hak-hak sipil, keadilan terhadap gender dan keadilan terhadap hak beragama.

Dengan demikian, manifesto politik Yesus oleh Gunche Lugo dapat memberikan kontribusi penting dalam membentuk wacana politik yang lebih adil, inklusif, dan etis di Indonesia, dengan menekankan nilai-nilai universal yang relevan dengan konteks lokal ketidakadilan dan ketimpangan.

3. KESIMPULAN

Gereja memiliki peran yang signifikan sebagai agen transformasi sosial melalui penerapan prinsip-prinsip manifesto politik Yesus. Dengan menekankan nilai-nilai keadilan, kasih, dan kepedulian terhadap sesama, gereja dapat mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif gereja dalam program-program diakonia dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anggota jemaat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam

komunitas. Penerapan prinsip-prinsip Yesus dalam tindakan nyata memberikan dampak positif yang luas, termasuk perubahan sikap dan peningkatan keterampilan kepemimpinan di kalangan anggota jemaat. Selain itu, gereja yang berfungsi sebagai fasilitator dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan gereja. Dengan demikian, gereja tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat perubahan sosial yang aktif dan relevan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya strategi pelayanan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendorong transformasi positif dalam masyarakat, menjadikan gereja sebagai agen perubahan yang mampu menjawab tantangan ketidakadilan sosial di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Suryawasita, SJ, *Asas-Asas Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1989
- A., Larosa, *Misi Sosial Gereja*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2001
- A., Suryawasita, *Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez*, Yogyakarta: Jendela, 2001
- Andreas, W, *Manajemen Gereja*, Bandung: Bina Media Informasi, 2011
- Artanto, Widi, *Menjadi Gereja Misioner-Dalam Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Bergant, Dianne, and Karris Robert J, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Biblika, Jurnal Teologi, and Victor Latumahina, 'PERAN GEREJA DALAM MENANGGAPI KEMISKINAN Victor Latumahina *', 6.1 (2021), 29–36
- Darminta, J, *Mengubah Tanpa Ketidakadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Gerrith Singgih, Emmanuel, *Berteologi Dalam Konteks*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Hartono, SJ, *Buku Pegangan Bagi Promotor Keadilan, Perdamaian, Dan Keutuhan Ciptaan*, ed. by Pr. Vikjen Pujasumarta, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Hasanah, Defi Uswatun, 'Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum', *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12.2 (2018), 109–16 <<https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7564>>
- J. L., Ch. Abineno, *Diaken: Diakonia Dan Diakoniat Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017
- Jacob, Tom, "'Gereja Dan Dunia'", in *Gereja dan Masyarakat*, ed. by J.B. Banawiratma, Yogyakarta: Kanisius, 1987

- John, Mansford Prior, “Conflict Resolution: Konflik Dan Ketidakadilan Gerakan Yesus Dan Dinamika Perujukan Sosial”, in *Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual*, ed. by J.B. Banawiratma, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Josep P., Widyatmadja, *Jesus & Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Di Indonesia*, IV, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017
- Lugo, Gunche, *Manifesto Politik Yesus*, Yogyakarta: ANDI, 2009
- Mouw, J Richard, *Dipilih Untuk Sebuah Misi Global : Panggilan Menuju Agenda Reformed Yang Lebih Luas Dalam Gustavo Gutierrez. a Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation*, Maryknoll: Orbis Books, 1973
- Natalie, ‘Evaluasi Kritis Terhadap Doktrin Gereja Dari Teologi Pembebasan’, in *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, Malang: SAAT Malang, 2009
- Noordegraaf, A, *Orientasi Diakonia Gereja :Teologi Dalam Perspektif Reformasi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017
- Nugroho, Fibry Jati, ‘Gereja Dan Kemiskinan: Diskursus Peran Gereja Di Tengah Kemiskinan’, *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 3.1 (2019),
- Nunez., C, and A Emilio., *Liberation Theology*, Chicago: Moody Press, 1985
- Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), *Dokumen Keesaan Gereja (DKG -PGI 2014-2019)* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015
- Raymundus, Sudhiarsa, *Menyapa Bumi Menyembah Hyang Ilahi: Tinjauan Teologis Atas Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Risdianto, Danang, ‘Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.1 (2017), <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>>
- Rozeyta Omar, and Halimah Mohd Yusof, *Westernization on Higher Education: The Impacts on the Life of Global Community*, *Jurnal Ecopsy*, 2020, VII
- Timotius, S, *Gereja Yang Bertumbuh Dan Berkembang*, Yogyakarta: ANDI, 2012
- Utomo, Kurniawan Madyo, ‘Panggilan Gereja Dalam Realitas Ketidakadilan Di Indonesia’, *Forum*, 52.1 (2023), 13–24 <<https://doi.org/10.35312/forum.v52i1.538>>
- Yusak B. Setyawan, Nancy Souisa, R Steve Gaspersz, and Atnawati Lesawengen, *Perdamaian Dan Keadilan ‘Dalam Konteks Indonesia Yang Multikultural Dan Beragam Tradisi Iman’*, ed. by Andri Setiawan and Veronica Vonny, I Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017